

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Press: Depok.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Black, Henry Campbell. 1968. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul Minn West Publishing Co.
- Charles Simabura, 2011. *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efensi. 2014. *Penelitian Hukum; Legal Research*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Gerard Schur. 2006. *Pengalaman Perlindungan Saksi di AS*. ELSAM-Koalisi Perlindungan Saksi. Jakarta.
- Hotma P. Sibuea. 2017. *Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: penerbit erlangga.
- Imam Mustafa. 2015. *Politik Hukum Islam Di Indonesia; Pergulatan Politik Dibalik Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. STAIN Jurai Siwo Metro: Lampung.
- Imam Syaukani. 2020. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. PT Raja Grafindo: Depok.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Koalisi perlindungan saksi. *Saksi Harus Dilindungi: Rancangan Undang-Undang Perlindungan saksi*. Jakarta: Indonesia corruption watch.
- Lili Rasjidi dan ira Thania Rasjdii. 2010. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT.citra Adytia Bakti.
- Lintje Anna Marpaung. 2012. "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum (Studi Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)". *Jurnal Pranata Hukum*. Volume 7 Nomor 1. Januari.
- Mahfud MD.1999. *Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta:Gama Media.
- , 2018. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali press.
- Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1: Jenis, Fungsi, dan Muatan materi*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2018. *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2. Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Miriam Budiardjo.1999. *Demokrasi Di Indonesia: Demokrasi parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ni'matul Huda dan R.Nazriyah.2011.*Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putera Astomo.2021. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ronny H. Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia.
- Sjachran Basah, 1981. *Hukum Tata negara perbandingan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soerjono Soekanto.2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suparman Marzuki.2014.*Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- UNODC (*United Nations Office on drug and Crime*). 2010. *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan*

Kejahatan Terorganisir. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Winardi dan Sirajuddin. 2019. *Politik Hukum*. Setara Press: Malang.

Saldi Isra. 2020. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan
Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan
Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian
Kompensasi restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan LPSK

Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LPSK
Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi LPSK

C. Jurnal

- Aris Irawan.2020. “Politik hukum pembentukan Undang-Undang Saksi dan Korban, dilihat dari perlindungan Whistleblower (saksi pelapor) dan saksi ahli di Indonesia” *Jurnal hukum. Akta Yudisia*. Volume 4. Nomor 2.
- Aldrian Bagus Frananta. 2019. “Implementasi Pemenuhan Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.” *Jurnal Recidive*. Volume 8 Nomor 3. September.
- Bambang Julianto.2020.”Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Lex Renaissance*. Volume 1, Nomor 5 Januari.
- Claudia Coloay.2018. “Perlindungan Hukum Terhadap *justice collaborator* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. *Lex Crime*. Volume 2. Nomor 1.
- Dewi Sari Sihotang.2016. “Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Dalam Perlindungan *Whistleblower* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”. *JOM Fakultas Hukum*. Volume 3. Nomor 2.
- Dwi Oktafiana dan Nita Aritani. 2020.”Model Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 27. Nomor 2. Mei.

- Edi Yuhermansyah. 2012. "Urgensi Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perspektif Kebijakan Hukum Pidana" *Jurnal Legitimasi: Hukum Pidana dan Politik Hukum*. Volume 1 Nomor 2. Januari-Juni.
- Eprina Mawati, Lies Sulistiani, Agus Takariawan. 2020. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitas Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Belo*. Volume 5. Nomor 2. Februari-juli.
- Erwin Asmadi.2020." Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana". *Jurnal Studia;Jurnal kajian Hukum*. Volume 1. Nomor 2. Oktober.
- Haris Budiman dan Gios Adhyaksa.2015." Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban" *Jurnal Unifikasi*, Volume 2. Nomor 1 Januari.
- Josephin Mareta. 2016. "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban (*Policy Analysis of Witness and Victim Protection*)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 10. Nomor 1. Maret.
- Laurensius Arliman.2017. "Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Berkelanjutan di Indonesia. *Lex Jurnalica*. Volume 14. Nomor 1. April.
- Lilik Mulyadi. 2014. "Perlindungan Hukum *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* DI Indonesia". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1. Nomor 3
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo.2018. "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana", *Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. Volume 33. Nomor 2. Mei.
- Manabus Pasaribu.2020. "Memperkuat Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Pemberian Perlindungan dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban". *Jurnal IlmiahSimantek*. Volume 4 Nomor 2. Mei.

- Michael Frans Berry.2018.”Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan”.*journal Muhammadiyah Law Review*. Volume 2. Nomor 2. Juli.
- M.Ali.Murtadho.2013. “Pengaturan Saksi pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda”. *Jurnal Mahasiswa Brawijaya*. Universitas Brawijaya.
- Nanda Ivan Natsir. 2013.”Kepastian Hukum Dalai Perlindungan Saksi dan Korban pelanggran HAM berat”. *Jurnal IUS*. Volume 1. Nomor 1. April.
- Ridwan.2014.”Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 64.
- Saristha Natalia Tauge. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”.*Jurnal Lex Crimen*. Volume 11 Nomor 2. April-Juni.
- Surafli Noho. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. *Jurnal Lex crime*. Volume 5. Nomor 5.
- Stefandi Kakunsi.2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagai Saksi Ahli Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014”. *Jurnal:Lex Crimen*. Volume 1. Nomor 1. Januari.
- Syahriza Alkohir Anggoro.”Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan”. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Volume 10, Nomor 1, Juni.
- Zhulfianan Pratiwi Hafid. 2019. “*Justice Collaborator* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tshun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban” *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*.Volume 6 Nomor 1 Juni.

D. Sumber Lainnya

Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2012

Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2013

Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014

Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Tiara Marisa, Skripsi, 2018. “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan korban
Pasca Diterbitkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban”. Jakarta: Univeristas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.

E. Website

Fefy Dwi Haryanto.2012. “Implementasi restitusi Korban masih rendah”.
Link:<http://nasional.sindonews.com/read/2012/09/13/13/672280/implementasi-restitusi-korban-masih-lemah>.

koalisi Perlindungan saksi. “pengertian saksi dan perlindungan bagi para pelapor
haruslah diperluas. Link: www.antikorupsi.org1.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), “Laporan Tahunan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016”, tersedia di
link:<http://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/4c75a3d4b4c0654862a779d4d28a583e.pdf>.

Pers LPSK. 2014. “Empat Masalah Utama Perlindungan Saksi dan Korban Tanpa
Revisi UUPSK”. *Pers Relase Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
No.17/PR/LPSK/02/2014*.

Rais Rozali. 2013. “Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan”.
Link: <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/> .

Tito Dirhantoro. 2022. Terekam CCTV, ini perjalanan PNS Saksi Korupsi
sebelum hilang dan ditemukan dibakar. Link:
<https://www.kompas.tv/article/329976/terekam-cctv-ini-perjalanan-pns-saksi-kasus-korupsi-sebelum-hilang-dan-ditemukan-tewas-dibakar>.

Tugas, Fungsi & Wewenang LPSK Link:
https://www.lpsk.go.id/index.php?profil/profil_detail28